



Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024

Putu Asih Rahayu¹, Nyoman Ari Surya Dharmawan², Putu Yunartha Pradnyana Putra³

Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: asih@student.undiksha.ac.id¹, arisuryadharmawan@undiksha.ac.id²,

putuyunartha.pradnyana.putra@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of each component of Regional Original Revenue (PAD) to the total PAD of Buleleng Regency during 2016–2024 and to identify the trend of its contribution development. The study is motivated by the importance of strengthening regional fiscal independence amid fiscal decentralization dynamics and the reduction of intergovernmental transfer funds. This research is based on regional economic development theory, fiscal decentralization theory, and the concepts of PAD contribution and trend analysis. This research employed a quantitative descriptive approach using contribution analysis and Least Square trend analysis methods. The study utilized secondary data in the form of the Regional Budget Realization Reports of Buleleng Regency from 2016–2024 obtained through documentation at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Buleleng Regency. The analysis focused on four PAD components: regional taxes, regional retributions, separated regional asset management results, and other legitimate regional revenues. The findings indicate that regional taxes and other legitimate regional revenues were the dominant contributors to the PAD structure of Buleleng Regency, while regional retributions and separated regional asset management results contributed relatively low proportions. The trend analysis revealed an increasing trend in regional tax contributions, whereas other components tended to fluctuate. This study concludes that PAD optimization should focus on strengthening regional tax sectors, diversifying revenue sources, and improving the effectiveness of regional retribution and asset management to enhance the fiscal independence of Buleleng Regency.

Keywords: Fiscal independence, PAD contribution, regional original revenue, regional retribution, regional tax.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total PAD Kabupaten Buleleng periode 2016–2024 serta mengidentifikasi tren perkembangan kontribusinya. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika desentralisasi fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Kajian ini menggunakan teori pembangunan ekonomi daerah, teori desentralisasi fiskal, serta konsep kontribusi dan analisis tren PAD sebagai landasan teoritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis kontribusi dan analisis tren metode Least Square. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Buleleng tahun 2016–2024 yang diperoleh melalui dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan terhadap empat komponen

PAD, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah menjadi komponen dominan dalam struktur PAD Kabupaten Buleleng, sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi relatif rendah. Analisis tren menunjukkan kecenderungan peningkatan kontribusi pajak daerah, sementara komponen lainnya mengalami fluktuasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi PAD perlu difokuskan pada penguatan sektor pajak daerah, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan retribusi dan aset daerah guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: *Kemandirian fiskal, kontribusi PAD, pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan pilar penting pemerintahan daerah pascareformasi yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD) untuk mendorong kemandirian pengelolaan keuangan daerah, efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas, serta percepatan pembangunan sesuai potensi daerah (Halim, 2018). Tingkat desentralisasi fiskal tercermin dari kemampuan daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat (Gianelle dkk., 2026; Halim, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang potensinya berbeda di tiap daerah sesuai kondisi sosial ekonomi dan kebijakan setempat (Mahmudi, 2019). Namun, penyesuaian fiskal nasional yang menyebabkan pengurangan transfer ke daerah (TKD) turut mempersempit ruang fiskal daerah sehingga pemerintah daerah dituntut lebih optimal dalam menggali PAD untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah (Purbaya, 2024).

Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih adaptif dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak, retribusi, dan pengelolaan sumber pendapatan lainnya guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Dewi dkk., 2023; Rahmawati, 2022). Selain itu, efisiensi belanja menjadi langkah penting agar pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, sehingga kebijakan ini mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui reformasi tata kelola anggaran dan optimalisasi potensi ekonomi lokal sesuai prinsip desentralisasi (Mahendra, 2023; Udayanti & Werastuti, 2025). Secara nasional, PAD menunjukkan tren peningkatan rata-rata 10–15 persen per tahun selama 2015–2022, meskipun masih terdapat disparitas kapasitas fiskal antardaerah dan ketidakstabilan penerimaan akibat perubahan kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan struktur anggaran daerah (BPS, 2023). Kondisi tersebut juga memunculkan fenomena *ratcheting effect*, yaitu kecenderungan target anggaran dipengaruhi realisasi tahun sebelumnya dan perubahan ekonomi selama pandemi.

Provinsi Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki potensi fiskal besar yang terutama bersumber dari sektor pariwisata, sehingga kabupaten/kota di Bali secara teoritis memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain dengan struktur ekonomi berbeda (Dewi & Sudiarta, 2021). Daerah yang memiliki struktur PAD yang kuat dan beragam terbukti lebih mampu menjaga kesinambungan belanja publiknya (Mahendra, 2023). Berdasarkan data Bapenda Provinsi Bali tahun 2017–2022, PAD Bali mengalami kenaikan sebesar 3,80% dengan dominasi pendapatan pajak daerah sebesar 84%, sementara retribusi daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar -19,61%. Di sisi lain, Kabupaten Buleleng sebagai salah satu wilayah terluas di Bali memiliki struktur ekonomi yang beragam, meliputi sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, dan jasa, yang memberikan peluang besar dalam optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Sesuai amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, optimalisasi PAD menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian (Dewi dkk., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, PAD Kabupaten Buleleng menunjukkan pola perkembangan yang dinamis. Penerimaan dari pajak daerah masih menjadi penyumbang utama, khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame sejalan dengan berkembangnya sektor layanan dan pariwisata di wilayah utara Bali. Sementara itu, retribusi daerah menghadapi tantangan terkait efektivitas pemungutan serta penyesuaian jenis layanan publik yang dikenakan retribusi. Di sisi lain, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan peranan yang relatif stabil, meski potensinya masih dapat dimaksimalkan melalui inovasi tata kelola aset dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Gambaran perkembangan realisasi PAD Kabupaten Buleleng pada tiga titik waktu yang merepresentasikan dinamika fiskal berbeda selama periode penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016, 2020, dan 2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)
2016	282.113.899.551,44
2020	318.986.891.632,31
2024	509.474.781.931,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data periode 2016–2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng menunjukkan tren meningkat secara nominal, dari Rp282,11 miliar menjadi Rp509,47 miliar, meskipun sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah (Sari & Pratiwi, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan struktural dan tantangan dalam pengelolaan PAD, terutama terkait kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total pendapatan daerah. Penelitian Khoryani dan Dharmawan (2025)

menemukan bahwa Lain-lain PAD yang Sah menjadi penyumbang terbesar PAD Kabupaten Buleleng periode 2019–2023 dengan kontribusi rata-rata 46,88%, diikuti Pajak Daerah sebesar 40,94%, sementara retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan kontribusi relatif kecil. Selain itu, efektivitas PAD hanya mencapai rata-rata 92,31% dan rasio kemandirian fiskal masih tergolong sangat rendah. Kajian lain menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama PAD Kabupaten Buleleng dengan kontribusi sekitar 39,84%, namun kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah dan belum optimal (Suarmanayasa dkk., 2024). Berbeda dengan Kabupaten Buleleng, penelitian di Kota Denpasar menunjukkan dominasi pajak daerah terhadap PAD mencapai lebih dari 75 persen, sedangkan di Kabupaten Badung PAD sangat dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran yang sensitif terhadap fluktuasi jumlah wisatawan (Asmara & Setiawan, 2021).

Penelitian Pamungkas dan Utami (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa periode 2012–2021 tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas mencapai 103,83 persen, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sedang, yaitu hanya sebesar 26,55 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun target pajak daerah tercapai, sektor pajak belum menjadi sumber dominan PAD sehingga struktur fiskal daerah masih bergantung pada sumber pendapatan lain (Parulian dkk., 2024). Sebaliknya, Apabila PAD tinggi maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Yuliani & Purnamawati, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, perluasan basis pajak, serta pembaruan sistem pemungutan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, masih terdapat research gap dalam kajian PAD Kabupaten Buleleng, karena penelitian sebelumnya hanya mencakup periode terbatas dan belum menganalisis seluruh komponen PAD secara komprehensif dalam jangka panjang, termasuk pergeseran dominasi antarkomponen akibat perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, dan guncangan eksternal terhadap struktur PAD daerah (Nugroho & Wahyuni, 2020; Sari & Pratiwi, 2022). Menurut Berset dkk. (2023), pemerintah daerah cenderung melakukan penyesuaian fiskal terhadap perubahan pendapatan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat bahwa pemahaman yang mendalam dan berbasis data mengenai kontribusi masing-masing komponen PAD merupakan prasyarat mutlak bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun strategi optimalisasi PAD yang tepat sasaran. Tanpa analisis yang sistematis dan komprehensif, kebijakan peningkatan PAD berisiko tidak menyentuh komponen yang paling potensial untuk dikembangkan, atau sebaliknya, memberikan tekanan berlebihan pada komponen yang sudah optimal sementara mengabaikan potensi yang belum tergali. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, mencakup periode Tahun Anggaran 2016–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara sistematis berdasarkan data numerik tanpa manipulasi variabel (Sugiyono, 2023). Rancangan bersifat non-eksperimental dengan desain time series untuk menangkap dinamika kontribusi komponen PAD dari tahun ke tahun (Creswell, 2018). Data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA-APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK RI, serta dokumen pendukung dari BPS Kabupaten Buleleng. Variabel penelitian mencakup empat komponen PAD sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022, yakni sebagai berikut.

Tabel 2. Pengukuran Komponen PAD

Variabel	Indikator	Satuan
Pajak Daerah	Realisasi tahunan pajak daerah	Rupiah
Retribusi Daerah	Realisasi tahunan retribusi daerah	Rupiah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi tahunan HPKDD	Rupiah
Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi tahunan lain-lain PAD sah	Rupiah
Total PAD	Total realisasi PAD tahunan	Rupiah
Kontribusi Komponen PAD	% kontribusi per komponen per tahun	Persen
Tren Kontribusi PAD	Nilai a (konstanta), nilai b (kemiringan), persamaan $Y' = a + bX$	Persen

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif melalui studi lapangan dan studi pustaka untuk memperoleh informasi terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi dan analisis tren dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD serta melihat kecenderungan perubahannya selama periode 2016–2024. Analisis kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap komponen PAD terhadap total PAD menggunakan kriteria penilaian tertentu, sedangkan analisis tren menggunakan metode *least square* melalui persamaan $Y' = a + bX$ untuk mengetahui kecenderungan peningkatan, penurunan, atau kestabilan kontribusi komponen PAD dari tahun ke tahun. Metode *Least Square* adalah teknik analisis tren yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif karena menghasilkan garis tren yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data aktual dengan nilai tren yang diestimasi, sehingga menghasilkan persamaan tren yang paling representatif (Sugiyono, 2023; Hamdani, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN***Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024***

Ditinjau dari hasil perhitungan berikut merupakan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng selama periode penelitian.

Tabel 3. Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2020

Tahun	Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total PAD
2016	102.239.172.923	15.129.372.042	15.030.436.697	149.714.917.890	282.113.899.551
2017	124.234.062.681	17.076.083.898	14.141.579.594	299.743.699.914	455.195.426.087
2018	133.652.474.410	19.056.986.034	13.029.559.420	169.816.473.528	335.555.493.393
2019	155.755.834.813	20.319.816.298	17.168.853.955	172.351.989.097	365.596.494.163
2020	118.257.303.530	19.809.775.071	19.823.539.604	161.096.273.427	318.986.891.632
2021	136.710.405.063	36.150.491.390	20.045.797.893	199.081.751.079	391.988.445.424
2022	172.689.999.523	30.078.820.360	15.581.604.415	192.214.466.960	410.564.891.258
2023	221.543.885.846	34.103.424.122	24.631.695.198	180.221.053.443	460.500.058.609
2024	251.948.162.384	217.716.187.750	30.720.076.754	9.090.355.044	509.474.781.931

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng, diolah penulis

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada masing-masing komponennya. Pajak daerah menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada periode 2021–2024. Pada tahun 2016 realisasi pajak daerah sebesar Rp102,24 miliar dan meningkat menjadi Rp251,95 miliar pada tahun 2024. Retribusi daerah juga mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai Rp217,72 miliar. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan peningkatan yang relatif stabil meskipun nilainya masih lebih kecil dibandingkan komponen lainnya. Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen dengan kontribusi terbesar pada sebagian besar periode penelitian. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi Rp9,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024

Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD. Kriteria penilaian kontribusi mengacu pada Halim (2018), dengan kategorisasi sebagai berikut: di bawah 10% dikategorikan Sangat Kurang (SK); 10,01%–20% dikategorikan Kurang (K); 20,01%–30% dikategorikan Sedang (S); 30,01%–40% dikategorikan Cukup Baik (CB); 40,01%–50% dikategorikan Baik (B); dan di atas 50% dikategorikan Sangat Baik (SB).

Tabel 4. Analisis Kontribusi Komponen PAD terhadap Total PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024

Tahun	Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total Kontribusi
2016	36,24%	5,36%	5,33%	53,07%	100%
2017	27,29%	3,75%	3,11%	65,85%	100%
2018	39,83%	5,68%	3,88%	50,61%	100%
2019	42,60%	5,56%	4,70%	47,14%	100%
2020	37,07%	6,21%	6,21%	50,50%	100%
2021	34,88%	9,22%	5,11%	50,79%	100%
2022	42,06%	7,33%	3,80%	46,82%	100%
2023	48,11%	7,41%	5,35%	39,14%	100%
2024	49,45%	42,73%	6,03%	1,78%	100%
Rata-rata (%)	39,73%	10,36%	4,84%	45,08%	25%

Sumber: Data diolah Penulis, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 39,73% terhadap total PAD Kabupaten Buleleng dengan kategori Cukup Baik (CB) dan tren yang terus meningkat seiring penguatan sistem pemungutan serta digitalisasi pajak daerah. Digitalisasi ini berkontribusi pada peningkatan akurasi dan efisiensi pemungutan pajak daerah (Fahreza & Sulindawati, 2024). Retribusi Daerah memiliki kontribusi rata-rata sebesar 10,36% atau kategori Kurang (K), namun mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 yang diduga dipengaruhi kebijakan penyesuaian tarif dalam UU HKPD. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi komponen dengan kontribusi paling kecil, yaitu rata-rata 4,84% dan tergolong Sangat Kurang (SK), yang menunjukkan masih rendahnya optimalisasi pengelolaan BUMD. Di sisi lain, Lain-lain PAD yang Sah menjadi komponen dengan kontribusi rata-rata tertinggi sebesar 45,08% atau kategori Baik (B), meskipun kontribusinya terus menurun sejak 2017 hingga 2024, yang mengindikasikan adanya pergeseran struktur PAD menuju sumber pendapatan yang lebih terstruktur seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Analisis Tren Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024 dengan Metode Least Square

Analisis tren keuangan daerah membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal (Ariana, 2025). Analisis tren dilakukan menggunakan metode *Least Square* dengan persamaan $Y' = a + bX$, di mana Y' adalah nilai tren kontribusi, a adalah konstanta (nilai tengah tren), b adalah koefisien tren yang menunjukkan

besaran dan arah perubahan per satuan waktu, dan X adalah variabel waktu yang dikodekan dari -4 (tahun 2016) hingga +4 (tahun 2024) dengan titik tengah 0 pada tahun 2020. Nilai b positif menandakan tren meningkat, sedangkan nilai b negatif menandakan tren menurun. Berikut disajikan hasil analisis tren untuk masing-masing komponen PAD. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan sistematis, berikut disajikan tabel rekapitulasi hasil analisis kontribusi dan tren seluruh komponen PAD Kabupaten Buleleng periode 2016–2024.

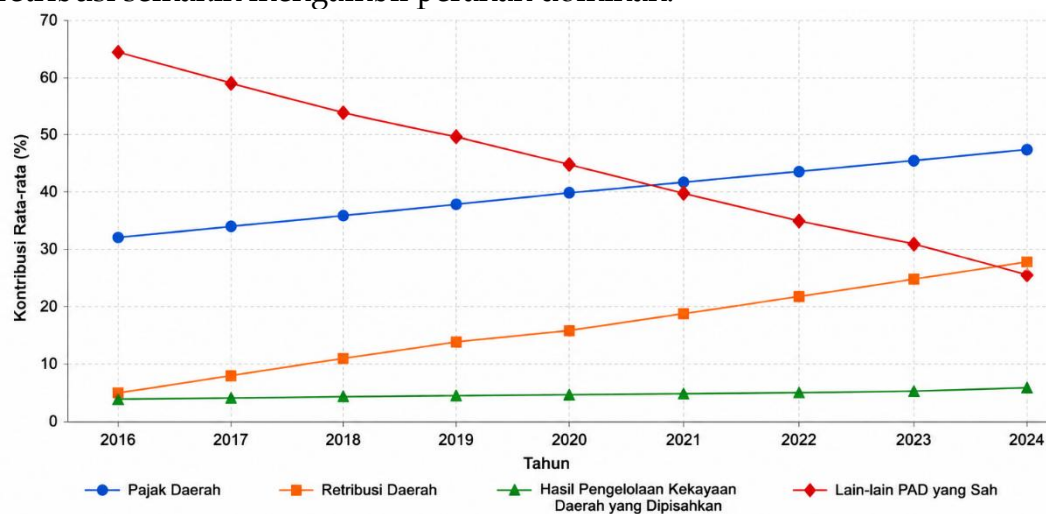
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Analisis Kontribusi dan Tren Komponen PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2024

No	Komponen PAD	Rata-rata Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi	Nilai a (Konstanta)	Nilai b (Koefisien Tren)	Arah Tren
1	Pajak Daerah	39,73	Cukup Baik (CB)	39,7265	1,8673	Meningkat ↑
2	Retribusi Daerah	10,36	Kurang (K)	10,361	2,7901	Meningkat ↑
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,84	Kurang (SK)	4,8351	0,1629	Meningkat ↑
4	Lain-lain PAD yang Sah	45,08	Baik (B)	45,0773	-4,8203	Menurun ↓

Analisis tren kontribusi Pajak Daerah menghasilkan persamaan $Y' = 39,7265 + 1,8673X$, dengan nilai a sebesar 39,73 yang menunjukkan rata-rata kontribusi pada tahun dasar 2020 sebesar 39,73%. Nilai b positif sebesar 1,8673 mengindikasikan tren kenaikan rata-rata 1,87 persen poin per tahun, sehingga apabila kondisi ini berlanjut, Pajak Daerah berpotensi menjadi komponen penyumbang PAD terbesar di masa mendatang. Sementara itu, Retribusi Daerah menghasilkan persamaan $Y' = 10,3610 + 2,7901X$ dengan nilai b sebesar 2,7901 yang merupakan tertinggi dibandingkan komponen lainnya, menandakan laju pertumbuhan tren yang paling cepat. Menurut Udeogu (2021) pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal dan perkembangan teknologi yang berkelanjutan sehingga kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan meningkatkan kapasitas fiskal menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Kondisi ini mengindikasikan prospek yang cerah bagi Retribusi Daerah dalam memperkuat PAD Kabupaten Buleleng, terutama apabila kebijakan tarif berdasarkan UU HKPD terus diimplementasikan secara konsisten. Di sisi lain, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menghasilkan persamaan $Y' = 4,8351 + 0,1629X$. Meskipun arah trennya positif, nilai b yang sangat kecil sebesar 0,1629 mengindikasikan peningkatan kontribusi yang sangat lambat, sehingga menuntut perhatian serius pemerintah daerah dalam mendorong kinerja BUMD secara lebih agresif agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih berarti. Adapun Lain-lain PAD yang Sah mencatat tren penurunan paling tajam dengan persamaan $Y' = 45,0773 - 4,8203X$, di mana nilai b negatif sebesar -4,8203 menggambarkan penurunan rata-rata 4,82 persen poin per tahun yang bersifat struktural. Penurunan ini mencerminkan pergeseran fundamental dalam komposisi PAD Kabupaten

Buleleng, di mana sumber-sumber pendapatan yang lebih terstruktur seperti pajak dan retribusi semakin mengambil peranan dominan.



Gambar 1. Diagram Tren Komponen PAD Tahun 2016-2024

(Sumber: Data Diolah Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 1, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kontribusi dan arah tren masing-masing komponen PAD. Lain-lain PAD yang Sah memiliki rata-rata kontribusi tertinggi (45,08%, kategori Baik), namun trennya justru menurun dengan nilai $b = -4,8203$. Sebaliknya, Pajak Daerah yang saat ini berkontribusi rata-rata 39,73% (kategori Cukup Baik) memiliki tren yang terus meningkat, menjadikannya komponen paling prospektif sebagai tulang punggung PAD di masa mendatang. Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak daerah penting karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem layanan *Drive Thru* SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Maharani & Adiputra, 2023). Retribusi Daerah meskipun masih berkategori Kurang (K) dengan rata-rata 10,36%, memiliki laju pertumbuhan tren yang paling cepat ($b = 2,7901$), sehingga potensi peningkatannya dalam jangka panjang sangat besar. Di sisi lain, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih berada pada kategori Sangat Kurang (SK) dengan rata-rata hanya 4,84%, dan laju peningkatan tren yang sangat lambat ($b = 0,1629$), sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif.

Implikasi Kebijakan

Hasil analisis di atas memberikan beberapa implikasi kebijakan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pertama, pemerintah daerah perlu terus mengintensifikan pemungutan Pajak Daerah, mengingat komponen ini memiliki tren yang paling konsisten meningkat dan berpotensi menjadi pilar utama PAD ke depan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pembaruan data wajib pajak, penerapan sistem *e-payment* yang lebih masif, serta peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi bagi

wajib pajak yang tidak patuh. Kedua, optimalisasi Retribusi Daerah perlu menjadi prioritas, terutama melalui implementasi penuh amanat UU HKPD yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam menetapkan tarif retribusi. Pemetaan ulang objek retribusi yang belum tergalai secara optimal perlu segera dilakukan, disertai dengan peningkatan kualitas layanan publik yang menjadi dasar pemungutan retribusi. Ketiga, pengelolaan BUMD perlu direformasi secara menyeluruh agar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Peningkatan kapasitas manajerial, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD sangat diperlukan. Keempat, penurunan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah perlu dipahami secara cermat. Apabila penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya sumber-sumber pendapatan yang bersifat non-reguler dan tidak terencana (seperti penerimaan dari klaim asuransi atau pendapatan tidak terduga lainnya), maka hal ini sesungguhnya merupakan sinyal positif karena struktur PAD menjadi lebih sehat dan berbasis pada sumber yang dapat diprediksi.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2016–2024 rata-rata sebesar 39,73% dengan kategori Cukup Baik (CB) dan memiliki tren meningkat sebesar 1,87 persen poin per tahun, sehingga berpotensi menjadi tulang punggung PAD di masa mendatang. Retribusi Daerah memiliki kontribusi rata-rata sebesar 10,36% dengan kategori Kurang (K), namun menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen, terutama setelah terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024 akibat kebijakan penyesuaian tarif berdasarkan UU HKPD. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,84% dan tergolong Sangat Kurang (SK), yang mencerminkan belum optimalnya kinerja BUMD dalam mendukung keuangan daerah. Di sisi lain, Lain-lain PAD yang Sah menjadi komponen dengan kontribusi tertinggi sebesar 45,08% atau kategori Baik (B), namun mengalami penurunan tren paling tajam, yang menunjukkan adanya pergeseran struktur PAD menuju sumber pendapatan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Buleleng sedang mengalami transformasi positif, di mana dominasi Lain-lain PAD yang Sah mulai digantikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini meliputi perlunya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah melalui pemutakhiran data wajib pajak, perluasan sistem pembayaran digital, peningkatan pengawasan, dan sosialisasi kesadaran pajak kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kontribusi Retribusi Daerah dengan memetakan kembali objek retribusi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengevaluasi tarif retribusi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Rendahnya kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mendorong perlunya reformasi pengelolaan BUMD melalui audit kinerja, penerapan *Good*

Corporate Governance (GCG), restrukturisasi BUMD yang tidak optimal, dan pengembangan investasi pada sektor potensial daerah. Penurunan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah juga perlu diantisipasi melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan pengurangan ketergantungan pada sumber pendapatan insidental. Di samping itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan analisis dengan perbandingan antardaerah, menggunakan metode analisis yang lebih kompleks, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan perpajakan nasional dalam analisis PAD.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariana, I. (2025). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Camat Bebandem Periode 2021-2023* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Berset, S., Huber, M., & Schelker, M. (2023). The fiscal response to revenue shocks. *International Tax and Public Finance*, 30(3), 814-848.
- BPS (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dewi, N. A. W. T., Darmawan, N. A. S., & Wiguna, I. G. N. H. (2023). Ratcheting Effects on Regional Government Revenue and Expenditure Budgets in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(2), 165-174.
- Dewi, N. A. W. T., Dewi, L. G. K., & Wiguna, I. G. N. H. (2024). Analisis Flypaper Effect dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Efek Moderasi Upaya Pajak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1-19.
- Dewi, N. K. A., & Sudiarta, I. W. (2021). Potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali: Analisis komparatif. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(3), 789-812.
- Fahreza, A., & Sulindawati, N. L. E. (2024). Analisis Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) BPHTB Pada BPKPD Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(2), 375-385.
- Gianelle, C., Sacchi, A., Salotti, S., Moio, A., & D'Apice, P. (2026). Granular indicators of fiscal decentralisation from the REGOFI and MUNIFI databases. *International Tax and Public Finance*, 1-27.
- Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. *Salemba empat*.
- Halim, A. (2018). Manajemen Keuangan Daerah. *Salemba Empat*.
- Hamdani, M. H. (2025). Analisis Trend, Estimasi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Probolinggo Tahun 2018-2022. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 1853-1859.
- Khoryani, P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(01), 192-201.

- Maharani, K., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 513-524.
- Mahendra, B. (2023). Reformasi Tata Kelola Anggaran dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah. *Jurnal Manajemen Anggaran*, 6(2), 78-85. <https://example.com/mahendra2023>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Ketiga)*. Erlangga.
- Nugroho, A. S., & Wahyuni, S. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 115-134.
- Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 118-129.
- Parulian, R. J., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Kontribusi PAD , Elastisitas PAD dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(4), 744-760.
- Purbaya, A. (2024). Kebijakan Penyesuaian Fiskal untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Fiskal*, 12(3), 10-15.
- Rahmawati, M. (2022). Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. *Jurnal Administrasi Keuangan Daerah*, 8(1), 45-52.
- Sari, D. P., & Pratiwi, R. A. (2022). Analisis kontribusi dan efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 78-97.
- Suarmanayasa, I. N., Yasa, I. N. P., Utami, A. I. A., Budiarta, I. W., & Wirata, I. P. G. (2024). Kajian Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Buleleng. *Saraswati: Jurnal Kelitbang Kabupaten Buleleng*, 3(1), 58-69.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Udayanti, L. T., & Werastuti, D. N. S. (2025). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(02), 249-265.
- Udeogu, E., Amakom, U., & Roy-Mukherjee, S. (2021). Empirical Analysis of an Augmented Schumpeterian Endogenous Growth Model. *Journal of Economic Development*, 46(1), 53-84.
- Yuliani, M. R., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Di BPKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(02), 276-286.